

LAPORAN PANITIA KHUSUS
BAHAN ACARA NOMOR 9 TAHUN 2019
PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018

Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati, Pimpinan Rapat Paripurna beserta Pimpinan Dewan lainnya,
yang terhormat, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

yang kami hormati, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta,

yang kami hormati, para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

yang kami hormati, segenap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,

yang kami hormati, rekan-rekan Pers, media massa hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur alhamdulillah ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat hadir untuk bersama-sama mengikuti Rapat Paripurna DPRD DIY dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2019 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2018.

Rapat paripurna yang kami hormati, sebelumnya atas nama Pimpinan Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 tahun 2019 pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih :

1. Kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Penghantaran Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 dalam rapat paripurna beberapa waktu lalu.

2. Kepada Pimpinan Rapat Paripurna yang telah memberi waktu kepada kami mewakili Panitia Khusus untuk menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus.
3. Kepada Rekan-rekan Anggota Panitia Khusus bersama Eksekutif Pemda DIY yang telah aktif berperanserta dalam pembahasan materi, banyak sumbang saran, ide-ide dan alternatif pendapat yang disampaikan dalam pembahasan Bahan Acara ini.
4. Kepada Tenaga Ahli Fraksi DPRD DIY dan Narasumber yang telah memberikan saran masukan kepada Panitia Khusus
5. Kepada Sekretariat Dewan yang selalu mendampingi dan memfasilitasi seluruh rangkaian kerja Pansus, sehingga dapat berjalan dengan lancar.
6. Ucapkan terimakasih juga kami sampaikan kepada rekan-rekan Pers, para pengamat dan seluruh warga masyarakat atas atensi yang diberikan sehingga dapat memperkaya pembahasan Pansus.

Semoga apa yang kita lakukan, sekecil apapun andil kita dalam pembahasan Bahan Acara ini, semoga Allah berkenan memberikan balasan yang setimpal, Aamiin yaa robbal 'aalamiin.

Rapat paripurna yang kami hormati,

Pada kesempatan ini perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Hasil Kerja Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 tahun 2019 mengenai Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2018, sebagai berikut :

I. Dasar Hukum.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat,

3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
4. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85/K/DPRD/2018 tentang Program Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019,
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 22/K/DPRD/2019 tentang Susunan Personalia Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2018 tersebut Dalam Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2019.
7. Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 11 Maret 2019 tentang review jadwal kegiatan DPRD DIY bulan Maret, April dan Mei 2019,

II. Proses Pembahasan Pansus.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat, menyebutkan bahwa pembahasan Catatan dan Rekomendasi LKPJ Gubernur dibahas secara internal di DPRD dan diberi waktu selama 30 hari, namun seiring perjalanan waktu Pansus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2019 memandang perlu melakukan klarifikasi data dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah, melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka study banding untuk memperkaya materi pemahaman terhadap ruang lingkup Rekomendasi/catatan DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur DIY Akhir Tahun 2018, dan meminta saran pendapat dari Pakar serta Konsultasi ke Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta.

Berikut adalah tahap – tahap pembahasan LKPJ Gubernur DIY Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan antara lain:

1. Penjelasan/Penghantaran Gubernur DIY terhadap terhadap LKPJ Gubernur DIY Akhir Tahun Anggaran 2018 disampaikan pada rapat Paripurna tanggal 25 Maret 2019.
2. Rapat Paripurna Pembentukan Panitia Khusus Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2019 pada tanggal 25 Maret 2019, dengan personalia sebagai berikut:
 - 1) Hj. TUTIEK MASRIA WIDYO,SE Ketua Pansus
 - 2) Drs. H. EDY SUSILA Wakil Ketua Pansus
 - 3) EKO SUWANTO, ST., M.Si Anggota Pansus
 - 4) KPH.PURBODININGRAT, SE., MBA Anggota Pansus
 - 5) NURYADI, S.Pd Anggota Pansus
 - 6) SADAR NARIMA, S.Ag., SH. Anggota Pansus
 - 7) SUKARMAN, S.Pd Anggota Pansus
 - 8) SLAMET, S.Pd., MM. Anggota Pansus
 - 9) ALBANI, ST Anggota Pansus
 - 10) NANDAR WINORO, ST Anggota Pansus
 - 11) Drs. ASLAM RIDLO Anggota Pansus
 - 12) SUBARNO Anggota Pansus
3. Pembahasan Bahan Acara oleh Panitia Khusus
 - a. Pansus diberi waktu pembahasan dari tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan 24 April 2019,
 - b. Rapat Internal Panitia Khusus dilaksanakan tanggal 26 Maret 2019,
 - c. Rapat Kerja Panitia Khusus yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Pansus bersama Tim dari Pemda DIY (Sekretaris Daerah, BPKA, Bappeda, Biro Hukum, Biro Organisasi, Inspektorat DIY) dilaksanakan pada tanggal 27, 28 dan 29 Maret 2019 dilanjutkan pada tanggal 8 dan 9 April 2019
 - d. Paparan Tenaga Ahli Fraksi dilaksanakan pada tanggal 9 dan 15 April 2019,
 - e. Untuk melengkapi pembahasan Pansus bersama Tim Pemda DIY melaksanakan Konsultasi ke Direktorat Fasilitas Kepala Daerah dan DPRD, Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 1 s/d 2 April 2019, dan Kunjungan Kerja ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan DPRD Provinsi Jawa Timur dilaksanakan pada tanggal 10 s/d 12 April 2019.
 - f. Finalisasi dan checking terakhir terhadap rancangan keputusan DPRD DIY tentang Catatan Dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2018 dilakukan pada rapat kerja pansus pada hari Senin 22 April 2019,

- g. Melalui Rapat Paripurna pada hari ini Kamis, 25 April 2019 memasuki tahap akhir pembahasan dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Bahan Acara Nomor 9 Tahun 2019, yaitu Persetujuan DPRD DIY terhadap Rancangan Keputusan DPRD DIY tentang Catatan Dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2018, kemudian dilanjutkan mohon perkenan Saudara Gubernur menyampaikan sambutannya.

III. Hasil Pembahasan Pansus.

Berdasarkan pembahasan yang telah dilaksanakan panitia khusus Bahan Acara Nomor 9 tahun 2019 dapat menyampaikan laporan bahwa hasil pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2018 berupa catatan-catatan kritis dan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang disusun berdasarkan rapat – rapat internal Panitia Khusus, masukan dari para pakar yang kompeten, hasil Konsultasi ke Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Hasil Kunjungan Kerja ke Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan masukan dari Fraksi-Fraksi beserta Tenaga Ahli Fraksi.

Catatan dan Rekomendasi yang diberikan akan menjadi Lampiran Rancangan Keputusan DPRD DIY yang kemudian akan ditetapkan menjadi Keputusan DPRD setelah mendapat persetujuan dari Rapat Paripurna ini.

Adapun Catatan dan Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Akhir Tahun Anggaran 2018, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

A. PENGANTAR DAN CATATAN UMUM

Merujuk pada data LKPJ 2018, dapat pahami secara umum, bahwa capaian pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta sepanjang tahun 2018 paling tidak sudah memberikan signal positif tentang capaian kinerjanya atau dengan kata lain telah memberikan trend kemajuan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Namun secara khusus ada hal-hal tertentu yang harus dikoreksi secara jujur dan terbuka. Hal itu bisa dilihat dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, dari yang ditetapkan sebanyak 14 IKU, yang tercapai sesuai kinerja Pemerintah Daerah sebanyak 10 IKU atau sebesar 71,42%. Dengan pengertian lain, ada 4 IKU yang tidak tercapai yaitu: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 2018 sebesar: 80,29 tercapai 79,59 atau tingkat capaiannya 99,13%, 2) Indeks Gini Rasio, dengan target sebesar 0,3917, hanya dapat dicapai sebesar 0,4220 atau sebesar 92,26%, 3) Prosentase Angka Kemiskinan, yang merupakan issue sentral dalam Prioritas Pembangunan DIY tahun 2018, Pemda DIY menetapkan target sebesar 11,23% tapi yang tercapai sebesar 11,81% atau sebesar 94,83%, 4) Indeks Williamson (Indeks Ketimpangan antarwialyah), target tahun 2018 sebesar 0,4559 dan tercapai sebesar 0,4641 atau sebesar 98,23%.

Apabila dibandingkan, capaian IKU Tahun 2018 sedikit berbeda namun ada kesamaan dengan IKU 2017. Persamaannya, sama-sama ada 4 IKU yang tidak tercapai pada 2018 dari 14 IKU yang ditetapkan, pada LKPJ 2017 ada 17 IKU, yang tidak tercapai 4 IKU. Perbedaannya, ada pada sektor capaian (Indeks Gini Ratio, Ketimpangan Wilayah, Prosentase Kemiskinan, IPM dan lama tinggal wisnus dan wisman). Satu hal yang harus menjadi catatan, bahwa LKPJ 2018 belum banyak menggeser issue-issue strategis Pembangunan Daerah, terutama tentang Kemiskinan, Ketimpangan Wilayah dan Indeks Gini dengan kata lain LKPJ 2018 belum banyak memberi arti yang signifikan bagi pembangunan secara umum, sebagaimana yang telah gariskan dalam skala prioritas pembangunan, terutama bila dibandingkan dengan LKPJ 2017 sebagai tolok ukurnya.

Untuk itu sudah sepatutnya dilakukan evaluasi secara serius dan mendalam terhadap 4 Indikator Kinerja Utama yang dilaporkan dalam LKPJ 2018 yang belum tercapai yaitu 1) IPM, 2) Indeks Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini), 3) Prosentase Angka Kemiskinan dan 4) Indek Ketimpangan Wilayah (Indeks Williamson). Data ke 4 IKU yang ditampilkan dalam LKPJ 2018 masih menunjukkan

adanya indikator kesenjangan yang cukup berarti sebagai tolok ukur keberhasilan Pembangunan di DIY. Hal ini harus mendapatkan perhatian serius secara bersama antara DPRD dan GUBERNUR untuk melakukan langkah-langkah strategis dan Inovasi dalam rangka mencari solusi yang tepat untuk mengatasi dan sekaligus menurunkan kesenjangan yang masih terjadi pada ke 4 Indikator kinerja Utama (IKU) Pemda DIY tersebut.

1. Angka Kemiskinan

Tahun 2018, angka kemiskinan sampai dengan September 2018 sebesar 11,81% dari target yang direncanakan sebesar 11,23% (realisasi 94,83%). Garis Kemiskinan (GK) per September 2018 adalah Rp414.899. Angka 11,81% tersebut *ekivalen* dengan jumlah penduduk miskin 450.250 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2017 jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 16.080 orang. Dan jika menggunakan indikator jumlah penduduk miskin, target 2018 tercapai karena di patok target 484.947 jiwa. Realisasi jumlah penduduk miskin versus target adalah 107,7%. Dengan demikian maka laju rata-rata penurunan kemiskinan selama September 2013 – September 2018 adalah sebesar 0,644%.

Sebagai perbandingan angka kemiskinan nasional per September 2018 adalah 9,66%, jika dibandingkan dengan propinsi lain di Jawa maka angka kemiskinan DIY termasuk yang paling tinggi. Jawa Tengah 11,81%, Jawa Timur 11,19%, Banten 10,85%, Jawa Barat 7,25% dan DKI sebesar 3,55%. Jika dicermati angka kemiskinan per kabupaten/kota terlihat dengan jelas bahwa ada kesenjangan antara wilayah Kota Yogyakarta (6,98%) dan Kabupaten Sleman (7,65%) dengan tiga kabupaten yang lain yaitu Bantul (13,43%), Gunung Kidul (17,12%) dan Kulonprogo (18,30%) seperti terlihat pada Tabel 4.4 (hal 4-9) LKPJ 2018.

Dari sisi kemampuan keuangan faktanya dari tahun ketahun selalu meningkat. Kemampuan keuangan pemda DIY terus mengalami kenaikan dari tahun ketahun. Demikian juga anggaran dari sumber Dana Keistimewaan (Danais) yang juga naik dari tahun ketahun.

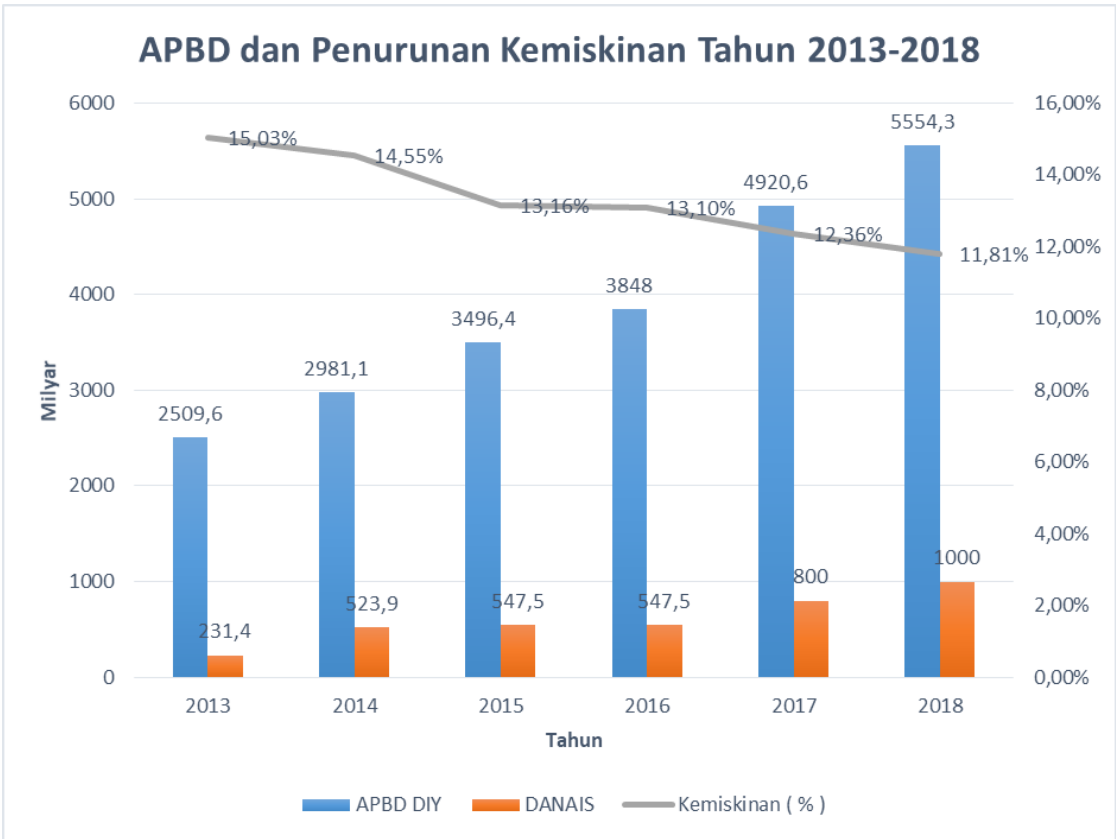
TAHUN	APBD DIY	DANAIS	Kemiskinan (%)	Laju
-------	----------	--------	----------------	------

Tahun 2013	2.509.569.218.343	231,4 milyar	15,03	
Tahun 2014	2.981.068.320.421	523,9 milyar	14,55	0,48
Tahun 2015	3.496.425.502.266	547,5 milyar	13,16	1,39
Tahun 2016	3.847.962.965.846	547,5 milyar	13,10	0,06
Tahun 2017	4.920.626.776.618	800,0 milyar	12,36	0,79
Tahun 2018	5.554.331.177.406	1 trilyun	11,81	0,55
Tahun 2022	(berdasar RPJMD)		7,00	

Catatan : Garis Kemiskinan Tahun 2017 Rp396.271,00

Garis Kemiskinan Tahun 2018 Rp414.899,00

Dan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY, untuk mendukung kewenangan urusan keistimewaan DIY Pemerintah memberikan Dana Alokasi Khusus (Danais) yang naik dari tahun ketahun. Terlihat bahwa kenaikan kemampuan keuangan Pemda DIY hanya berdampak kecil terhadap laju penurunan angka kemiskinan. Adanya kenaikan APBD tidak berkorelasi secara langsung dengan laju pengurangan kemiskinan. Sejak 2013 sampai 2018 laju penurunan kemiskinan tertinngi pada tahun 2015 yang mencapai angka 1,39%, dan laju terendah pada tahun 2016 yang sebesar 0,06% dalam satu tahun. Dan secara rata-rata dalam enam tahun terakhir laju penurunan kemiskinan sebesar 0,644% pertahun. Sementara target yang di patok dalam RPJMD 2017 – 2022 adalah menjadi 7% di tahun 2022. Berat namun harus optimis. Dengan kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas dan ikhlas maka bukan hal yang mustahil angka 7% dapat dicapai di akhir periode Jabatan Gubernur tahun 2022 yang akan datang.



Dari grafik APBD dan Penurunan Kemiskinan Tahun 2013-2018 di atas terlihat dengan jelas bahwa angka kemiskinan DIY mengalami penurunan dari tahun ketahun. Namun laju penurunan kemiskinan tidak sama dalam setiap tahun anggaran. Kemampuan keuangan daerah yang makin besar tidak serta merta diikuti dengan kecepatan laju penurunan kemiskinan yang sama. Ada faktor-faktor di luar kemampuan keuangan daerah yang perlu diperhatikan. Ketepatan startegi, kebijakan, program, sasaran dan kegiatan serta pengendalian sangat penting mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemerintahan DIY.

Menurut BPS ditemukan adanya data yang tidak akurat dalam hal data penduduk miskin. Sehingga diperlukan koreksi data. Secara metodologi salah satu faktor penting untuk mengukur angka kemiskinan adalah apa yang disebut Garis Kemiskinan (GK). Pada tahun 2018 angka GK DIY sebesar Rp414.899, naik jika dibandingkan dengan GK tahun 2017 yang berada pada angka Rp396.271. Jumlah anggota keluarga di DIY rata-rata adalah 4,22 jiwa. Dengan demikian sebagai suatu keluarga dikategorikan miskin adalah;

$$\text{Rp}414.899 \times 4,22 \text{ jiwa} = 1.750.874$$

Porsi terbesar untuk konsumsi (71,36%)

Apabila suatu keluarga jumlah pengeluaran kurang dari angka tersebut maka akan dikategorikan sebagai keluarga miskin.

Dengan memahami secara metodologis BPS tersebut maka yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka kemiskinan dapat ditempuh dengan pendekatan sebagai berikut.

Rekomendasi :

1. Dari paparan di atas terlihat bahwa laju penurunan kemiskinan tidak terkait secara signifikan dengan nilai APBD yang ada. Laju penurunan kemiskinan dipengaruhi oleh banyak faktor. Ketepatan dalam menentukan kebijakan, program serta kegiatan untuk mendukung capaian indikator perlu dilakukan evaluasi agar tepat sasaran.
2. Melakukan perbaikan dan validitas data KK miskin. Sebab berdasar temuan BPS masih banyak keluarga mampu yang masuk dalam data KK miskin.
3. Menaikan Upah Minum Propinsi. UMP Propinsi DIY tahun 2018 sebesar Rp1.454.153.00 UMP berkorelasi signifikan dengan penurunan angka kemiskinan.
4. Memberikan akses kepada masyarakat miskin terhadap sumber pendapatan baru selain pendapatan tetap yang selama ini dimiliki. Contoh keberhasilan Kabupaten Gunung Kidul dalam menurunkan angka kemiskinan dengan akses pengelolaan obyek pariwisata kepada warganya. Kabupaten Gunung Kidul menggeser Kabupaten Kulonprogo menjadi urutan keempat.
5. Menumbuhkan wirausaha baru melalui berbagai kegiatan pemberdayaan oleh OPD. Jumlah WUB tahun 2018 bertambah 720. jumlah UKM tahun 2018 sejumlah 259.581 unit.
6. Meningkatkan akses pendidikan melalui lama rata-rata sekolah. Dalam LKPJ 2018 juga telah dinyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan warga akan semakin punya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih baik.
7. Peningkatan kualitas ketrampilan dan keahlian siswa lulusan SMK. Berdasar data yang ada selama ini lulusan SMK yang ada serapannya masih tergolong rendah.

8. Mencegah secara serius alih fungsi lahan pertanian. Di laporkan luas alih fungsi lahan tahun 2016/2017 seluas 2.812 hektar. Perda DIY tentang lahan pertanian perlu diawasi pelaksanaannya.
9. Intervensi dengan bantuan makanan untuk warga miskin

2. Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan sangat erat kaitannya dengan pendapatan warga DIY. Indeks Gini 2018 sebesar 0,4220 masih terhitung ekstrem. Namun usaha pemerintah untuk menurunkan harus terus dibeikan dukungan. Capaian tahun 2018 yang sebesar 92,26% sehingga tidak tercapai dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar 0,3917.

Yang perlu dievaluasi sejauh mana usaha untuk menurunkan ketimpangan tersebut. Dari sisi kebijakan, wilayah mana yang dijadikan sasaran, dan berapa kegiatan termasuk anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi hal tersebut. Harus ada ukuran untuk menilai bahwa telah dilakukan intervensi secara memadai untuk menunjukkan adalah *political will* dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan pendapatan tersebut.

Rekomendasi:

1. Untuk mengurangi kesenjangan pendapatan (indeks gini) yang dapat dilakukan pemerintah adalah menciptakan lapangan kerja bagi warga yang masih menganggur. Perlu dibuat perda perlindungan investasi daerah, dengan tujuan agar pelaku usaha yang berinvestasi di DIY mengambil bahan dan tenaga kerja dari wilayah DIY, hal ini untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan secara sekaligus.
2. Meningkatkan upah minimum propinsi agar pendapatan karyawan meningkat. Hal ini juga terkait dengan garis kemiskinan. UMP di DIY masih tergolong rendah.

3. Indeks Ketimpangan Wilayah

Hal yang sama juga berlaku untuk melihat sejauh mana usaha untuk menurunkan ketimpangan wilayah. Hal ini bisa diukur dengan strategi, kebijakan, program dan kegiatan. Dan bisa dilihat dari sisi anggaran

pemerintah yang dialokasikan pada wilayah yang masih dalam kategori tertinggal. LKPJ 2018 telah memetakan dengan baik bahwa dua wilayah yakni Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman menyumbang 60% dari PDRB DIY dibandingkan tiga wilayah yang lain yakni Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulonprogo. Adanya megaprojek Bandara YIA (NYIA) belum secara signifikan mendongkrak angka ketimpangan wilayah. Hasil 2018 sebesar 0,4641 (atau realisasi 98.23%) masih belum memperlihatkan perubahan yang berarti. Perlu evaluasi dan rencana aksi yang lebih progresif untuk menurunkan ketimpangan wilayah. Terutama bagaimana mendorong peran investasi masuk ke wilayah-wilayah tertinggal tersebut.

Rekomendasi :

1. Pemerintah daerah harus terus-menerus berupaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut, dengan mensinergikan seluruh potensi dan program Pembangunan secara terpadu, khususnya antara Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota. Tanpa keterlibatan Pemerintah Kabupaten dan Kota secara simultan, sangat kecil kemungkinan bisa menekan ketimpangan pembangunan antar wilayah
2. Pemda DIY perlu memberi kebijakan afirmatif agar pemerintah DIY memiliki political will untuk mendongkrak pembangunan dengan memperhatikan daerah/wilayah tertinggal yang terutama meliputi Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul.
3. Meneruskan program menjadikan kecamatan miskin sebagai upaya mempercepat pemerataan pembangunan.

4. Indeks pembangunan manusia (IPM)

Capaian IPM DIY tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan. Angka IPM 2018 sebesar 79,59 (realisasi 99,13%) dari target 80,29. Walaupun tidak mencapai target yang perlu diapresiasi adalah IPM di DIY jauh di atas IPM nasional.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Untuk umur panjang dan hidup sehat di ukur dengan Umur Harapan Hidup (UHH) yang untuk tahun 2018,

UHH DIY tahun 2017 sebesar 74.71. Untuk UHH tahun 2018 mencapai angka 74.87 (realisasi 99.74%) dari target 75.06.

Untuk Rata Rata Lama Sekolah, data belum ditemukan. Yang ada adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yang angkanya mencapai 15.55 (realisasi 100.26%) dari target 15.51. Rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 sesuai LKPJ 2017 adalah 9.24 tahun. Untuk mendukung program wajar 12 tahun maka rata-rata lama sekolah perlu di prioritaskan. Apalagi hal ini sangat terkait dengan angka pengangguran dan kemiskinan. Angka pengangguran terbuka (TPT) tahun 2018 adalah 3.35% tidak mencapai target yang sebesar 2.78%.

B. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan atau otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proposional. Implementasi dari Undang-Undang tersebut di atas diwujudkan dalam pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di daerah dalam rangka mencapai kesejahteraan rakyat

Arah kebijakan dan strategi pembangunan lintas bidang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan perluasan dan peningkatan pelayanan dasar sebagai salah satu upaya penanggulangan kemiskinan dan salah satu faktor pendukung kualitas layanan dasar adalah kualitas pengelolaan keuangan yang harus memenuhi prinsip kepatuhan, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta rensponsif.

Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi terlaksananya optimisasi penyelenggaraan pelayanan publik.

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Catatan:

1. (belum ada dlm usulan)

b. Rekomendasi

1) Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan

mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan daerah.

- 2) Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di DIY, proporsi sumber pendapatan utamadaerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) oleh sebab itu maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), lain-lainpendapatan yang sah, dana perimbangan bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak,sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU secara bertahap dapatmulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.
- 3) Diharapkan adanya kajian mengenai potensi daerah yang cermat dan akurat yang dapat dipergunakan sebagai landasan dalam perencanaan pendapatan daerah.

2. Pengelolaan Belanja Daerah

a. Catatan:

1. (belum ada dlm usulan)

b. Rekomendasi

1. (belum ada dlm usulan)

C. BIDANG PEMERINTAHAN

(Belum ada usulan catatan dan rekomendasi untuk setaip urusan bidang pemerintahan)

Bidang pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018 banyak mengalami kemajuan, khususnya dalam pencapaian target yang dicanangkan. Pemberdayaan aparatur sipil negara (ASN) sudah banyak dilakukan untuk tujuan peningkatan sumberdaya dalam bidang pemerintahan. Proses pemberdayaan yang dilakukan pada aparatur sipil negara (ASN) harus tetap dilanjutkan untuk

perbaikan, tata pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam bidang pemerintahan, di Daerah Istimewa Yogyakarta mencakup beberapa bidang, yang masih diharapkan bisa mengalami perbaikan-perbaikan di banyak bidang mulai dari bidang pemerintahan, sosial kemasyarakatan, kebencanaan, hingga pada pengembangan informasi teknologi dalam bidang pemerintahan.

1. Urusan Pemerintahan

Kemajuan urusan pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta selalu menjadi perhatian banyak khalayak. Mulai dari aktivis LSM, akademisi, pemerintah daerah lain, hingga oleh stakeholder pemerhati kebijakan. Perhatian banyak pihak tersebut dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi salah satu acuan pengembangan tata pemerintahan di Indonesia. Daerah Istimewa Yogyakarta banyak dijadikan contoh dan tauladan dalam pengembangan tata pemerintahan maupun dalam persoalan kebijakannya.

Dari laporan LKPJ, tata pemerintahan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta cukup banyak melakukan pengembangan sumberdaya, khususnya pengembangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Tentu saja beberapa kebijakan lain yang dikembangkan juga perlu diapresiasi, khususnya beberapa peraturan daerah yang mendorong perbaikan kinerja kelembagaan dan kebijakan pembangunan. Prestasi yang patut diapresiasi adalah Daerah Istimewa Yogyakarta mampu mempertahankan WTP dalam kinerjanya.

2. Sosial Kemasyarakatan

Peristiwa pemilu dalam setiap tahun di Indonesia selalu membawa perubahan wacana sosial dan politik kewargaan. Masyarakat yang semakin pintar dengan banyaknya akses informasi tentu saja mempunyai pendapat sendiri dalam membangun wacana sosial politik. Informasi masuk deras melalui smart phone telah mengubah pola pikir kewargaan, mulai dari wacana sosial, wacana ideologi politik, hingga pada sikap kerukunan kewargaan yang bergeser. Perpecahan pandangan ideologi politik semakin mencemaskan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan, budaya, ramah dan toleran (City of tolerance) semakin terganggu dengan banyaknya persoalan sosial kewargaan yang terpolarisasi konflik sosial.

3. Kebencanaan

Kemampuan dan daya dukung lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta

makin lama makin buruk. Peristiwa banjir di kawasan Bantul selatan pada tahun 2017 dan tahun 2019 menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami krisis lingkungan, khususnya kawasan konservasi daerah utara. Berkurangnya area konservasi tanah dan air, hilangnya area pertanian produktif, hingga kerusakan lingkungan karena pertambangan menyebabkan daya dukung lingkungan menurun. Persoalan ini belum lagi ditambah minimnya konservasi air rumah tangga perkotaan dan menurunnya air permukaan untuk keperluan air bersih masyarakat kota. Kesalahan kebijakan penentuan dan peruntukan kawasan menjadi catatan tersendiri untuk segera diperbaiki jika tidak ingin terjadi bencana lokal.

Selain memperbaiki kualitas lingkungan, pemerintah daerah Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan terus melakukan pendidikan kebencanaan, baik dengan cara menambah kader-kader tanggap bencana, pemberian fasilitas alat-alat tim kebencanaan, pendidikan komunitas pemberi bantuan kebencanaan, hingga pada penambahan jumlah desa siaga bencana.

4. Pengembangan Tata Pemerintahan Desa

Persoalan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, hingga kesenjangan pembangunan infrastruktur kawasan pedesaan telah menyebabkan desa-desa mengalami kesulitan dalam pengembangan tata pemerintahan. Persoalan tersebut tentu harus direspon dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa untuk terus menempatkan agenda desa membangun dalam memperjuangkan kesejahteraan warga. Potensi desa-desa di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu saja harus terus dikembangkan melalui perbaikan penyelenggaraan tata pemerintahan sebagai ujung tombaknya.

5. Pengembangan Program Desa – Desa Perbatasan

Perhatian Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk membangun kawasan desa dalam wilayah perbatasan dengan propinsi lainnya, harus menjadi perhatian khusus. Kantong-kantong kemiskinan dan ketertinggalan infrastruktur pembangunan banyak ada di kawasan perbatasan. Tentu saja prioritas pembangunan desa kawasan perbatasan menjadi penting, khususnya untuk menyongsong rencana pembangunan jangka panjang hingga 2038 yang melakukan konsolidasi sumberdaya kawasan pedesaan.

Harapan pembangunan kawasan pedesaan perbatasan adalah mempersiapkan

sumberdaya yang ada di kawasan tersebut untuk mempunyai bekal daya saing jika ada perubahan-perubahan kebijakan pembangunan.

6. Keistimewaan Yogyakarta

Prestasi kebijakan dan program Keistimewaan Yogyakarta dari tahun ke tahun makin meningkat. Penyerapan anggaran yang ada dalam program dan kegiatan Keistimewaan Yogyakarta juga makin membaik. Tentu saja prestasi tersebut patut dibanggakan.

Program dan kegiatan yang bisa dilihat seperti kebijakan pembentukan perda keistimewaan, pertanahan, budaya dan lainnya mulai berjalan dengan baik.

7. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Secara jelas pelayanan publik sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 yang memberikan penjelasan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memiliki Perda DIY Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik. Namun dari capaian indikator nilai eksternal pelayanan publik belum memenuhi target (nilai eksternal pelayanan publik dari target 8,50 realisasinya adalah 8,28 atau 97.41%), walaupun nilai capaian di atas merupakan olahan sementara dari hasil survey yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB. Dengan demikian perlu adanya komitmen dari Pimpinan Daerah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas. Hasil penilaian yang diperoleh DIY menunjukkan adanya peningkatan dan keseriusan.

Di lain pihak dalam layanan publik masih terdapat permasalahan seperti pelayanan terhadap kebersihan yang terkait dengan pengelolaan sampah yang hingga kini masih menjadi problematika mengingat bahwa timbunan sampah per hari di DIY mencapai sekitar 2.100 ton, besarnya sampah itu menjadikan TPA Piyungan kini overload, padahal Pemda DIY telah memiliki

Perda No 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di semua kawasan; meningkatkan kualitas lingkungan, dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Namun faktanya terjadi overload sampah di TPA Piyungan yang dapat berdampak pada Lingkungan dan Manusia seperti Kesehatan maupun pencemaran serta keindahan

Rekomendasi:

- 1) Memperkuat fungsi koordinasi yang dilakukan oleh gubernur untuk memperkuat komitmen dari kabupaten/kota untuk mengimplementasikan Perda DIY No. 5 Tahun 2014 tentang pelayanan publik di wilayah masing-masing;
- 2) Optimalisasi dalam implementasi Perda DIY No. 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis sampah rumah tangga atau dilakukan peninjauan terhadap Perda tersebut.
- 3) Perlu teknologi tinggi dalam pengolahan sampah dan terus dilakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah.

D. BIDANG PEREKONOMIAN

1. Urusan Penanaman Modal

a. Catatan :

- 1) Pertumbuhan investasi PMA dan PMDN di DIY pada tahun 2018 ini mengalami lonjakan yang sangat tinggi yaitu sebesar 56,18%. Angka Pertumbuhan pada tahun ini adalah angka paling tinggi dalam 10 tahun terakhir. Namun Lonjakan ini disumbang kegiatan konstruksi bandara baru NYIA yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura I sementara investasi di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul masih jauh tertinggal.
- 2) Walaupun penanaman modal mengalami pertumbuhan tinggi, namun pertumbuhan tersebut sangat tidak merata. Setengah dari nilai Investasi PMDN di DIY berada di Kabupaten Kulonprogo senilai 5 Triliun rupiah, sementara investasi di Kabupaten Bantul hanya 3,75% dan Kabupaten Gunung Kidul hanya 1,01%. Nilai investasi PMA di Kota Yogyakarta dan

Kabupaten Sleman mencapai 83,5%. Tentu hal ini akan sangat berpengaruh pada naiknya indeks ketimpangan antar wilayah.

- 3) Kenaikan investasi di DIY tidak berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Pembangunan bandara NYIA yang diharapkan dapat menyerap ribuan tenaga kerja ternyata hanya mampu menyerap 750 tenaga kerja. Demikian pula dengan PMA, meskipun secara jumlah nilai investasi jauh melampaui target, namun penyerapan tenaga kerja sangat minim. Dari 46.219 yang ditargetkan hanya mampu menyerap 62% saja atau 28.661 tenaga kerja.
- 4) Pembangunan bandara NYIA sangat berpengaruh terhadap kenaikan Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB di DIY yang telah mencapai 96,37% dari target RPJMD tahun 2022, padahal pembangunan bandara NYIA masih berlangsung. Pada tahun 2019 ini dipastikan target RPJMD akan terlampaui.

b. Rekomendasi

- 1) Tren iklim investasi di DIY mengalami kenaikan karena situasi sosial cukup kondusif, sarana prasarana sudah memadai, infrastruktur sudah meningkat, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada pelayanan perizinan mendapat nilai A (sangat baik) untuk itu Pemerintah Daerah DIY harus selalu berinovasi dan mengevaluasi kebijakan penanaman modal ini agar meningkat serta merata sehingga dapat mengurangi ketimpangan wilayah.
- 2) Pemerintah DIY perlu membuat rencana induk penanaman modal yang berbasis pada keunggulan potensi daerah kabupaten sehingga tidak terkonsentrasi di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman saja. Pemerintah Daerah perlu meyakinkan calon investor tentang prospek dan kemudahan berinvestasi di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul terlebih sudah akan beroperasinya bandara NYIA.
- 3) Seharusnya dengan masuknya investasi ke Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat menyerap tenaga kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar serta mengurangi ketimpangan wilayah. Untuk itu Pemerintah DIY perlu melakukan percepatan investasi, lebih memprioritaskan dan memberi insentif

kemudahan kepada perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja terutama di Kabupaten Bantul, Gunung Kidul dan Kulon progo

- 4) Nilai PMTB dalam PDRB DIY sudah akan melampaui target RPJMD 2022 sehingga diperlukan revisi terbatas pada RPJMD sebagai dasar kebijakan penanaman modal pada tahun 2020.

2. Urusan Pariwisata

a. Catatan

- 1) Visi besar pariwisata DIY sampai pada tahun 2025 yang akan mewujudkan DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara perlu dipertajam dan lebih konsisten dalam mewujudkannya. Persaingan pariwisata cukup ketat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat untuk berwisata. Hal ini perlu diantisipasi agar DIY tidak dikejar kompetitor baik dalam maupun luar negeri.
- 2) Pada LKPJ tahun 2018 ini tidak ada data jumlah pengunjung yang datang ke Daerah Tujuan Wisata. LKPJ hanya membatasi jumlah wisatawan yang menggunakan jasa akomodasi saja, sementara jumlah wisatawan yang tidak menginap tidak tersedia datanya. Kalau pada tahun-tahun sebelumnya data ini dicantumkan dalam LKPJ karena jumlah pengunjung ini merupakan salah satu data yang dapat menggambarkan kondisi pariwisata di DIY pada tahun 2018.
- 3) Jumlah wisatawan nusantara hanya meningkat 9,13% atau lebih kecil daripada tahun 2017 yang meningkat 15,19%. Demikian juga dengan wisatawan manca negara yang kenaikannya hanya 4,63% menurun jauh daripada tahun 2017 yang naik sebesar 12%. Angka kenaikan yang kecil ini harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah DIY karena sektor pariwisata memegang peran penting dalam pertumbuhan ekonomi DIY.
- 4) Jumlah hotel mengalami peningkatan pesat yaitu bertambah 26 hotel berbintang dan 413 hotel non bintang tapi semuanya berada di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Gunung Kidul ada penambahan 62 hotel non bintang sementara di Kabupaten Bantul dan Kulonprogo tidak ada penambahan hotel sama sekali. Hal ini berakibat pada kemacetan sehingga mengurangi kenyamanan wisatawan.

- 5) Jumlah belanja wisatawan mengalami peningkatan sebesar 17,17%.
Pengeluaran Wisatawan manca negara paling banyak untuk membayar perjalanan wisata dan membeli produk kerajinan. Sementara wisatawan nusantara untuk membayar penginapan dan makan minum.
- 6) Banyak SDM Pariwisata yang belum memiliki sertifikasi kompetensi

b. Rekomendasi :

- 1) Pemerintah DIY harus selalu melakukan inovasi, terobosan baru kalau perlu merubah strategi dalam pengembangan pariwisata DIY sehingga visi besar pariwisata 2025 dapat tercapai.
- 2) Dalam penyusunan LKPJ hendaknya mencantumkan data jumlah pengunjung yang datang ke Daerah Tujuan Wisata sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya.
- 3) Pemerintah DIY agar melakukan riset untuk menentukan keunggulan kompetitif pariwisata DIY serta penelitian terhadap minat masyarakat terhadap pariwisata sehingga DIY mampu menangkap pasar pariwisata tersebut.
- 4) Seharusnya sektor pariwisata ini dapat menggerakkan ekonomi masyarakat, menyerap tenaga kerja, serta mampu menaikkan pendapatan masyarakat, untuk itu Pemerintah DIY perlu membina masyarakat agar berperan aktif, sadar wisata sehingga dampak pariwisata tidak hanya dinikmati sebagian kecil masyarakat saja
- 5) Pemerintah DIY telah banyak melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi di negara lain, seharusnya Pemerintah DIY dapat mengoptimalkan kerjasama tersebut dengan mendatangkan wisatawan mancanegara dari negara negara ini.
- 6) Pemerataan hotel sehingga tidak hanya terpusat di kota.
- 7) Pengembangan atraksi wisata yang berbasis wilayah yang terintegrasi dengan kawasan penginapan dan potensi daerah.
- 8) Peningkatan SDM pariwisata dengan pemberlakuan standar kompetensi nasional.

3. Urusan Perindustrian

a. Catatan:

- 1) Sektor industri memberikan kontribusi tertinggi dalam struktur PDRB DIY yaitu sebesar 12,99%, jumlah unit IKM pun meningkat sebesar 3,98%. Angka ini meningkat dan lebih baik dibanding pertumbuhan rata-rata 5 tahun terakhir yaitu 2,56%. Peningkatan ini seiring dengan tumbuhnya sektor pariwisata.
- 2) Peningkatan jumlah IKM ini diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 6,33% melebihi tahun sebelumnya 2,6%, tetapi peningkatan nilai produksi sebesar 2,29% lebih kecil daripada tahun sebelumnya yang mampu meningkat 6,46%.
- 3) Produk IKM sangat banyak diminati oleh pasar namun kualitas SDM dalam mengelola IKM (manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran, penguasaan teknologi informasi) masih terbatas sehingga banyak produk yang belum memenuhi standar dan sertifikasi produk akibatnya kurang diterima pasar.
- 4) Kemitraan dengan industri besar belum berjalan dengan baik.
- 5) Bahan baku masih belum dapat dipenuhi oleh daerah sendiri sehingga masih tergantung pasokan dari daerah lain.
- 6) Dalam LKPJ 2018 ini tidak memuat tentang pengembangan industri kreatif, padahal potensi industri kreatif di DIY sangat besar.

b. Rekomendasi:

- 1) Pemerintah DIY diharapkan mampu menaikkan kualitas SDM bagi para pelaku IKM ini termasuk memberi pendampingan agar produk IKM terstandarisasi dan tersertifikasi sehingga mempunyai nilai tambah dan daya saing.
- 2) Kebutuhan bahan utama industri sedapat mungkin dipenuhi dari wilayah DIY sendiri, namun jika harus mendatangkan dari provinsi lain, maka Pemerintah DIY perlu memfasilitasi pelaku IKM dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah provinsi tersebut sehingga kerjasama ini saling menguntungkan.
- 3) Pertumbuhan pariwisata DIY harus dapat menimbulkan dampak menggerakkan industri kecil menengah. Sedapat mungkin kebutuhan pariwisata DIY dapat dipenuhi sendiri oleh IKM di DIY.

- 4) Pemerintah DIY perlu mengembangkan industri yang mempunyai dan menonjolkan ciri khas budaya Yogyakarta sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan DIY.
- 5) Pemerintah DIY perlu meningkatkan fasilitasi kemitraan antara IKM dengan Perguruan Tinggi, industri besar dan stakeholder lainnya baik dalam permodalan, peningkatan teknologi, inovasi produksi maupun strategi pemasaran.
- 6) Pemerintah DIY harus lebih serius dalam mengembangkan industri kreatif sehingga diharapkan DIY sebagai kiblat industri kreatif di Indonesia. Hal ini sangat realistis mengingat sumber daya alam yang terbatas sementara potensi SDM industri kreatif di DIY banyak dan unggul.

4. Urusan Perdagangan

a. Catatan:

- 1) Sektor perdagangan (termasuk akomodasi dan makan minum) memberikan kontribusi sebesar 8,59% terhadap struktur PDRB DIY lebih tinggi dari angka nasional 4,97%, namun angka ini turun drastis karena pada tahun sebelumnya sektor ini tumbuh besar dan kontribusi terhadap struktur PDRB DIY sebesar 17,84%.
- 2) Nilai ekspor DIY pada tahun 2018 ini sebesar US \$ 338,02 juta atau meningkat 13,96% dari tahun lalu, bahkan peningkatan ini melampaui pertumbuhan rata-rata ekspor dalam 5 tahun terakhir sebesar 12,13%. Hal ini ditandai dengan bertambahnya jumlah eksportir sebesar 9,79%. Komoditas utama ekspor DIY masih bertumpu pada industri pakaian jadi, mebel kayu, sarung tangan kulit, dan minyak atsiri. Problematika yang muncul adalah belum tersedianya infrastruktur dan sarana ekspor yang memadai.
- 3) Kasus sengketa konsumen yang diadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) meningkat 6 kasus menjadi 48 kasus di tahun 2018. Hal ini menunjukkan perlindungan konsumen belum terjamin dan kesadaran produsen masih kurang.

b. Rekomendasi:

- 1) Pemerintah DIY telah melakukan perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi negara lain. Diharapkan pemerintah DIY mengoptimalkanme kerjasama tersebut pada peningkatan kerjasama perdagangan ekspor impor.
- 2) Di samping ekspor ke luar negeri diharapkan pemerintah DIY juga melakukan kerjasama perdagangan dalam negeri dengan daerah lain di Indonesia.
- 3) Terkait dengan ketersediaan bahan pangan segar serta pemasarannya, pemerintah DIY diharapkan dapat menjalankan amanat sesuai yang tertuang pada Peraturan Daerah DIY Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan Segar.
- 4) Pemerintah DIY diharapkan dapat membuat terobosan baru atau membuat model pengawasan terhadap barang-barang yang beredar menggunakan teknologi informasi, sehingga perlindungan konsumen tetap terjaga.
- 5) Optimalisasi peran BPSK kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen tentang pentingnya tertib niaga dan perlindungan konsumen.

5. Urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

a. Catatan :

- 1) Program peningkatan pertumbuhan Wira Usaha Baru (WUB) mengalami peningkatan dari 657 WUB di tahun 2017 menjadi 720 di tahun 2018 atau hanya meningkat 63 WUB. Sebagai salah satu program penanggulangan kemiskinan peningkatan jumlah WUB ini sangat kecil.
- 2) Jumlah koperasi yang dibubarkan pada tahun 2017 sebanyak 414 dilanjutkan pembubaran 513 koperasi pada tahun 2018 sehingga selama 2 tahun terakhir ada 927 koperasi yang tidak aktif sehingga dibubarkan. Pada 2018 masih ada 63 koperasi yang tidak aktif.
- 3) Koperasi primer masih mendominasi jumlah koperasi sementara koperasi sekunder justru mengalami penurunan menjadi 26 koperasi.

- 4) Kapasitas kelembagaan koperasi juga menguat ditandai dengan meningkatnya permodalan sebesar 18,81% dan kenaikan volume usaha sebesar 19,46%
 - 5) Jumlah UMKM meningkat menjadi 259.581 unit atau mengalami peningkatan 4,58%. Pertumbuhan ini masih harus ditingkatkan karena telah terbukti sektor UMKM cukup eksis dan menyerap banyak tenaga kerja.
 - 6) Omzet koperasi sudah mencapai Rp4.394.362.000 artinya sudah melampaui target akhir RPJMD tahun 2022 sebesar Rp3.772.250.000
 - 7) Pada laporan LKPJ ini tidak disajikan jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor koperasi dan UMKM.
- b. Rekomendasi :
- 1) Pemerintah DIY hendaknya melakukan perhatian yang lebih serius untuk mengetahui penyebab banyak koperasi yang tidak aktif dan bubar, untuk selanjutnya melakukan langkah-langkah penyehatan koperasi.
 - 2) Pemerintah DIY harus lebih intensif dalam meningkatkan pembinaan koperasi baik pada kelembagaan dan SDM koperasi.
 - 3) Pemerintah DIY harus membuat program strategis untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berwirausaha terutama kepada generasi muda sehingga tumbuh pengusaha pengusaha baru yang mampu bersaing. Target pertumbuhan Wira Usaha Baru juga harus ditingkatkan minimal 10%.
 - 4) Pemerintah DIY perlu membuat terobosan dalam meningkatkan dan mengembangkan kapasitas pengusaha sehingga berdaya saing tinggi terutama menghadapi revolusi industri 4.0.
 - 5) Jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor Koperasi dan UMKM perlu disajikan dalam LKPJ untuk membuktikan bahwa sektor ini merupakan soko guru perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta.
 - 6) Perlu revisi terbatas RPJMD 2022 karena omzet Koperasi dan UMKM telah melampaui target RPJMD 2022 sebagai dasar hukum untuk kebijakan penyusunan APBD 2020.

6. Urusan Pangan

a. Catatan:

- 1) Secara umum, urusan Pangan di DIY masih menyisakan sejumlah masalah yang harus segera diselesaikan. Walau Indikator Kinerja Skor PPH (Pola Pangan Harapan) pada tahun 2018 dapat terealisasi 89,92 (realisasi target 100%), namun skor tersebut masih lebih rendah dari capaian nasional sebesar 90,4.
- 2) Ketersediaan pangan di DIY telah tercukupi dengan baik karena adanya koordinasi intensif dengan para pihak terkait. Cadangan pangan pemerintah dan masyarakat terus dikembangkan dan ditingkatkan karena sangat berguna ketika terjadi kerawanan maupun krisis pangan dan bencana. Namun kenyataannya di DIY masih terdapat desa rawan pangan. Artinya, tujuan utama pembangunan ketahanan pangan di DIY belum dapat diwujudkan.
- 3) Aspek keamanan pangan masih cukup memprihatinkan.

b. Rekomendasi:

- 1) Pengetahuan dan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang pentingnya memproduksi dan mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus ditingkatkan melalui sosialisasi, advokasi, dan promosi terus menerus, sampai ke tingkat RT dan menysar lembaga pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Program dan kegiatan pengentasan Desa Rawan Pangan belum dapat berjalan dengan baik. Terbukti dengan masih adanya 7 Desa Rawan Pangan DIY. Adanya Desa Rawan Pangan disebabkan oleh rendahnya aksesibilitas, terbatasnya ketersediaan dan pemanfaatan pangan karena faktor kemiskinan, kondisi geografis, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Penyelesaian terhadap berbagai penyebab di atas harus segera dilakukan secara tuntas, dan mestinya menjadi prioritas utama pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Adalah sesuatu yang salah apabila di wilayah DIY yang relatif kecil dan mudah dijangkau, apabila masih terdapat masalah aksesibilitas dan kesulitan mengatasi kondisi geografis. Mereka yang masih tergolong miskin dan rentan hendaknya dapat diberi perhatian khusus dengan mengalokasikan cadangan pangan yang tersedia.

- 3) Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah (JKPD) perlu meningkatkan kerjanya dengan semakin memperluas wilayah pengawasan produksi dan peredaran pangan. Masih banyak produksi pangan yang beredar di masyarakat yang tidak terjamin mutu dan keamanannya. Untuk dapat bertindak lebih jauh, diperlukan sebuah peraturan di tingkat lokal (baik Perda maupun Pergub).

7. Urusan Kelautan dan Perikanan

a. Catatan:

- 1) Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, produksi perikanan budidaya terus menunjukkan peningkatan, sedangkan perikanan tangkap mengalami fluktuasi. Pada tahun 2014 ke tahun 2018 produksi ikan budidaya meningkat sebesar 48,99%. Sedangkan perikanan tangkap menurun sebesar 7,18%. Keduanya memiliki potensi untuk dapat ditingkatkan produksinya yang juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan.
- 2) Areal budidaya ikan yang sudah dipakai untuk pembangunan New Yogyakarta International Airport sampai saat ini belum ada lahan pengganti.

b. Rekomendasi:

- 1) Salah satu masalah yang dialami oleh para pembudidaya ikan selama ini adalah tingginya biaya produksi akibat mahal dan terus meningkatnya harga pakan ikan. Selain itu sulit dan mahalnya bibit ikan jenis tertentu yang harus didatangkan dari luar daerah.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, maka OPD terkait diminta untuk bersungguh-sungguh memberikan solusi, baik masalah pakan maupun bibit ikan. Para pembudidaya difasilitasi untuk dapat membuat pakan sendiri dari bahan baku lokal yang murah dan terjangkau. Demikian juga untuk masalah bibit ikan yang berkualitas baik, diupayakan agar dapat dilakukan di wilayah DIY.

Guna meningkatkan produksi ikan tangkap, para nelayan perlu terus diberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mereka. Termasuk kemampuan untuk mengelola dan mengoperasikan kapal-kapal ikan besar.

8. Urusan Pertanian

a. Catatan:

- 1) Alih fungsi lahan pertanian pangan produktif masih terus berlangsung.
- 2) Minat generasi muda untuk bekerja di bidang usaha pertanian semakin menurun.

b. Rekomendasi:

- 1) Selama Pemda DIY tidak berani tegas untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (termasuk menyusun regulasi turunannya), maka alih fungsi lahan akan sulit dikendalikan. Pemda DIY harus bersikap tegas terhadap pemerintah daerah kabupaten agar berkomitmen untuk penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- 2) Generasi muda kurang berminat untuk bekerja di sektor pertanian karena tidak melihat peluang untuk hidup lebih baik dengan bertani. Mereka melihat orang tua dan keluarga mereka yang menjadi petani yang masih jauh dari sejahtera. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk meyakinkan mereka agar mau bekerja di bidang usaha pertanian. Mereka perlu dibuka wawasannya tentang cerahnya sektor pertanian sebagai sandaran hidup. Mereka diberikan ketrampilan plus, ketrampilan bertani dan kemampuan berwirausaha.

9. Urusan Kehutanan

a. Catatan:

- 1) Luas lahan di DIY mencapai 30,61% dari wilayah DIY seluas 3.185,80km². Angka ini sudah ideal, akan tetapi sewaktu-waktu dapat berkurang karena didominasi oleh hutan rakyat, dan Pemda DIY belum memiliki data potensi untuk pengembangan hutan rakyat.
- 2) Meningkatnya jumlah ekowisata dapat mengancam kerusakan hutan.

b. Rekomendasi:

- 1) Dari total hutan DIY seluas 97.534,22 ha, hutan negara hanya seluas 19.133,95 ha. Sedangkan hutan rakyat seluas 78.400,27 ha (80,38%). Kondisi ini berpotensi untuk berkurang sewaktu-waktu, karena pemilik berhak penuh untuk memanen/menebang dan melakukan alih fungsi hutan. OPD terkait harus pandai bernegosiasi dengan pemilik agar mau

diajak mengelola hutan milik mereka dengan pola pengelolaan terpadu. Pemilik diberikan fasilitas tanaman non hutan yang dapat dijadikan sumber pendapatan alternatif di luar kayu.

- 2) Walaupun ekowisata sangat menjanjikan dari sisi pendapatan, namun harus tetap menjaga keseimbangan antara fungsi ekologi, fungsi sosial dan fungsi ekonomi dari hutan. Pemda DIY hendaknya membatasi pemberian izin pengelolaan hutan sebagai ekowisata. Walaupun bukan sebagai satu-satunya penyebab, janganjangan banjir yang terjadi di Bantul bagian selatan juga terjadi karena keseimbangan hutan yang sudah terganggu.

E. BIDANG PEMBANGUNAN

1. Urusan Pekerjaan Umum

- a. Catatan:
- b.Rekomendasi

2. Urusan Perumahan

- a. Catatan:
- b.Rekomendasi

3. Urusahan Lingkungan Hidup

- a. Catatan:
- b.Rekomendasi

4. Urusan

F. BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

1. Urusan Pendidikan

- a. Catatan:

Jumlah penduduk DIY berdasarkan BPS tahun 2019 berjumlah 3.818.266. Dari jumlah tersebut, jumlah yang masih berada pada usia sekolah (7-18 tahun) ada sebanyak 17,54% atau sejumlah 669.723 anak dan 89,64% (600.340 anak) penduduk usia sekolah masih tercatat sebagai peserta didik pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar, menengah maupun khusus. Sementara yang 10,36% penduduk usia sekolah tersebut tidak ada

keterangan. Masih ada 69.383 anak yang belum diketahui status pendidikannya.

Salah satu parameter untuk melihat kinerja urusan pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Capaian pemerintah DIY untuk parameter ini adalah 9,24 tahun (2017) naik dari 9,10 tahun (2016). Namun untuk LKPJ 2018 ini capaian rata-rata lama sekolah tidak lagi disampaikan. Demikian juga untuk parameter angka melek huruf yang pernah mencapai angka 94,64 pada tahun 2017. LKPJ 2018 menyampaikan capaian indikator kinerja program pemda yaitu Harapan Lama Sekolah, yang didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Angkanya adalah 15,55 yang merupakan angka proyeksi (menunggu publikasi data resmi BPS) dengan mempertimbangkan tren capaian 2014-2018. Mengapa parameter rata-rata lama sekolah untuk 2018 tidak disampaikan. Demikian juga untuk angka melek huruf.

Jika dilihat dari parameter Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), pemerataan akses pendidikan di DIY masih perlu terus ditingkatkan terutama untuk jenjang sekolah menengah atas. Capaian APK untuk jenjang pendidikan menengah selama 2014-2018 menunjukan angka yang fluktuatif dengan rata-rata APK 92,88 (Gambar 1.13 buku LKPJ 2018).

Dengan melihat data-data tersebut program wajib belajar 12 tahun perlu mendapatkan dukungan yang lebih besar lagi dari Pemerintah Daerah DIY. Apalagi berdasar Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan sekolah menengah sudah menjadi kewenangan pemerintah propinsi. Selain masalah kuantitas untuk sekolah menengah, DPRD juga melihat masalah kualitas sekolah menengah juga masih perlu ditingkatkan.

Dari data jumlah pengangguran terbuka, yang pada tahun 2018 berjumlah 73.350 orang, bertambah 9.331 orang, jika dibandingkan tahun 2017 yang berjumlah 64.019 orang. Dan hal ini meningkatkan capaian TPT yang tahun 2018 sebesar 3,35% dari target 2,78% (realisasi 82,98%). Pengangguran menurut kelompok umur didominasi penganggur usia muda dan produktif

berusia di bawah 35 tahun yang jumlahnya mencapai 89,59% naik jika dibandingkan dengan proporsi di tahun 2014 yang sebesar 78,80%. Dan pengangguran menurut pendidikan didominasi pendidikan menengah (SMA dan SMK) yakni 46,51%, sementara yang berpendidikan diploma dan sarjana mencapai 21,26%.

Apakah hal ini ada hubungannya dengan kualitas hasil pendidikan menengah? Berdasar laporan yang ada bahwa angka ujian nasional SMK tahun 2018 mengalami penurunan. Hasil ujian nasional SMK sebesar 54,77, jauh dari target yakni 57,65 (95%), dan mengalami penurunan dibanding capaian 2017 yakni 57,43. Hal itu tidak terjadi pada SMA. Rata-rata hasil ujian nasional SMA 62,5 dari target sebesar 57,45 (realisasi 108,79%) dan naik dibanding 2017 yang mencapai 57,39. Sasaran akhir RPJMD yakni tahun 2022 untuk rata-rata hasil ujian nasional SMA adalah 58,41 dan untuk SMK adalah 58,29.

Jika dilihat dari persentase sekolah menengah dan khusus yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dilaporkan bahwa sekolah yang telah memenuhi SNP > 90 adalah sebesar $156/460 \times 100\% = 33,91\%$, meliputi SMA sebanyak 52 dari 163 sekolah, SMK sebanyak 79 dari 218 sekolah dan SLB sebanyak 25 dari 79 sekolah. Dari capaian SNP > 90 masih banyak sekolah menengah yang difasilitasi agar bisa memenuhi SNP yang telah ditetapkan.

Dalam mendukung pengurangan kemiskinan dan pengangguran peran pemuda aktif perlu ditingkatkan. Dalam LKPJ 2018 dilaporkan bahwa jumlah pemuda kader aktif bertambah sebanyak 217 pemuda, yakni dari 6.567 pemuda menjadi 6.784. Perlu upaya yang lebih keras dan tepat sasaran agar pemuda tidak banyak yang menganggur. Terutama kegiatan yang mendukung kewirausahaan (*entrepreneurship*) yang berdampak secara positif terhadap perbaikan ekonomi DIY.

Untuk persentase sekolah yang melakukan pendidikan berbasis budaya dengan kategori maju (realisasi 25 atau 419%) SMK/SMA/SLB hasilnya 18/29/39 atau sangat baik 25/baik 38/cukup 27/kurang sebanyak 10 sekolah. Pendidikan berbasis budaya sangat penting mengingat pendidikan karakter perlu ditanamkan sejak usia dini terutama melalui sekolah agar

nantinya lulusan peserta didik, tidak hanya pintar secara ilmu pengetahuan dan ketrampilan namun juga memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik.

b. Rekomendasi :

- 1) Program wajib belajar 12 tahun perlu didorong dan didukung agar rata-rata lama belajar siswa meningkat. Tahun 2018 tidak menyampaikan angka capaian rata-rata lama sekolah. Untuk mengukur berapa rata-rata lama sekolah warga DIY, maka angka rata-rata lama sekolah perlu dilaporkan. Dan upaya apa saja yang telah dilakukan Pemerintah DIY untuk meningkatkan rata-rata lama belajar?
- 2) Dari sisi pendidikan yang masuk warga pengangguran (TPT) tamatan SMA dan SMK. Dan berdasar data yang ada sekitar 50% tamatan SMK tidak terserap di dunia kerja. Untuk itu pemerintah perlu lebih serius meningkatkan kualitas dan kompetensi siswa SMK agar lulusanya memiliki kemampuan dan kompetensi yang siap bersaing dengan daerah lain untuk mencari kerja.
- 3) Dengan capaian angka kelulusan SMK yang rendah dibandingkan dengan siswa SMA maka perlu dilakukan upaya perbaikan dan evaluasi agar hal ini tidak terulang di tahun 2019. Jumlah sekolah yang SNP > 90 terus ditingkatkan.
- 4) Upaya untuk pemerataan kualitas sekolah antardaerah dan antarwilayah terus diusahakan agar kualitas lulusan sekolah dari DIY meningkat.
- 5) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan beasiswa mahasiswa berprestasi perlu ditingkatkan jumlah penerimanya agar makin banyak warga DIY lulus perguruan tinggi.
- 6) Kesejahteraan guru dan tenaga non guru (GTT/PTT) perlu ditingkatkan untuk mendukung capaian kinerja urusan pendidikan

2. Urusan Kesehatan

a. Catatan:

Untuk kinerja urusan kesehatan dapat diberikan catatan bahwa sesuai dengan usaha untuk memperbaiki umur harapan hidup (UHH). UHH DIY termasuk tinggi, jika dibandingkan propinsi lain, yakni 74,87 tahun. Memang belum mencapai target yang diharapkan yakni 75,06 (realisasi 99,74%). Sejumlah parameter kesehatan terus diusahakan untuk diperbaiki,

seperti; angka kematian ibu dan balita, perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pelayanan kesehatan, peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat, serta pencegahan dan pengendalian penyakit. Pada tahun 2018 angka kasus kematian ibu, bayi dan balita masih mengalami kecenderungan naik. Pada tahun 2017 angka kasus kematian sebesar 313. Dan angka kematian balita 343 kasus. Untuk angka kematian ibu (AKI) tahun 2017 sebanyak 34 kasus. Tahun 2018 tidak ada laporan. Untuk angka prevalensi kurang energy protein (KEP) tahun 2018 sebesar 7,94% mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yang sebesar 8,26%

Berdasar hasil riset kesehatan dasar (Riskesdas) tahun 2018, dilaporkan bahwa masih ada prevalensi penyakit menular seperti infeksi saluran pernafasan (ISPA) Pneumonia, Tuberculosis TB Paru, diare, malaria dan filariasis walaupun masih di bawah angka nasional. Namun untuk penyakit yang tidak menular seperti kanker, stroke, ginjal kronis, diabetes, jantung dan hipertensi menunjukkan prevalensi melebihi angka nasional. Penyakit lain seperti HIV AIDS dan TB terus bertambah.

Untuk capaian indikator urusan kesehatan sesuai dengan RPJMD ada empat indikator dan hasilnya mencapai realisasi 100% bahkan lebih. Sebagai contoh indikator kinerja sasaran persentase pukesmas melaksanakan program jogja sehat dengan pendekatan keluarga. Target 67,77%, dan realisasi 100% sehingga capainnya adalah 149%. Namun yang perlu di perhatikan adalah keterkaitan antara capaian indikator ini dengan masih tingginya angka kejadian penyakit menular sebagaimana dipaparkan di atas. Demikian juga dihubungkan dengan parameter AKI, Angka kematian bayi, angka kematian balita serta KEP (gizi buruk). Sulitnya menekan kasus kematian ibu, bayi dan balita dari tahun ke tahun disebabkan oleh banyak faktor diantaranya adalah kond isi 3T (terlambat merujuk, terlambat sampai dan terlambat mendapatkan pertolongan) dan kualitas kesehatan ibu hamil. Sehingga bentuk intervensi kebijakan mengenai permasalahan ini perlu ditekankan. Akses pada sarana pelayanan kesehatan yang terstandar dan ketersediaan tenaga kesehatan yang merata sehingga dapat mencegah dari kematian perlu diperhatikan.

Demikian juga dengan capaian persentase pelayanan kesehatan yang

terakreditasi. Pada tahun 2018 ditargetkan sebesar 64,89% terealisasi 66,41%. Hal ini patut diapresiasi dimana akreditasi memberi jaminan akan pelayanan kesehatan yang terstandar di unit-unit pelayanan kesehatan yang ada. Namun yang masih memprihatinkan adalah belum meratanya jumlah sarana pelayanan kesehatan yang ada terutama rumah sakit dan ketersediaan dokter spesialis. Dari IPM bisa dilihat banyak hal. IPM DIY adalah 79,59 yang merupakan akumulasi dari IPM per Kabupaten/Kota. IPM Kota Yogyakarta 85,49, Sleman 82,85, Bantul 78,67, Kulonprogo 73,23 dan Gunung Kidul 68,73. Dengan demikian DPRD terus mendorong agar ada political will untuk memberikan prioritas kebijakan dan anggaran untuk mengurangi kesenjangan di berbagai bidang urusan pemerintahan.

Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah DIY terkait dengan tingginya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) sebagaimana telah dipaparkan di atas. Jika program dan kegiatan yang ada belum nampak hasilnya maka perlu dilakukan pendekatan yang berbeda. Hal ini untuk mencegah kenaikan kasus setiap tahun.

b. Rekomendasi:

- 1) Laporan LKPJ 2018 perlu dilengkapi dengan data-data capaian angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita.
- 2) Memperhatikan tingginya kesenjangan antar kabupaten khususnya Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman di satu sisi dengan tiga kabupaten lain (Bantul, Kulonprogo dan Gunung Kidul) dan rasio dokter, rumah sakit yang ada maka Pemerintah DIY perlu memberi prioritas kebijakan dan anggaran untuk memperbaiki kesenjangan yang ada.
- 3) Meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular (PTM) harus ditangani dengan kebijakan, program dan kegiatan yang nyata. Terutama dari aspek promotive dan pemberian KIE baik melalui sekolah, posyandu serta tempat lainnya.
- 4) Khusus angka kejadian HIV/AIDS yang menurut LKPJ angkanya meningkat, namun tidak disebutkan jumlah kasusnya perlu disampaikan datanya secara valid. Selain itu untuk mencegah penularan penyakit tersebut perlu langkah-langkah yang lebih baik dibandingkan upaya yang

sudah ada selama ini.

- 5) Demikian juga perlu upaya yang sungguh-sungguh untuk menurunkan KEP atau balita kekurangan gizi. Perlu intervensi kebijakan yang menysasar problem utama tingginya KEP seperti perbaikan gizi warga miskin dan bumil.

3. Urusan Sosial

a. Catatan:

Keberhasilan penurunan jumlah penduduk miskin DIY dari target sebesar 484.947 tahun 2018 dengan realisasi sebesar 450.250 (sebesar 107,7%) perlu mendapatkan apresiasi. Walaupun secara persentase jumlah penduduk miskin angka tersebut belum tercapai. Sebab sampai dengan September 2018 adalah 11,81% dari target 11,23%. Pemerintah DIY telah melakukan terobosan yakni dengan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Jenjang Ekonomi Bagi Keluarga Fakir Miskin dan RTSM Tahun 2018. Bentuk kegiatannya berupa pemberdayaan Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan (KPM PKH) graduasi dengan usaha ekonomi produktif berupa pemberian modal usaha. Mekanisme dilakukan dengan Bantuan Keuangan Khusus merealisasikan 301 KPM PKH graduasi di 5 kabupaten/kota dengan bantuan modal usaha masing-masing sebesar Rp2.300.000. Kegiatan dilaksanakan dengan menggunakan tahapan pelaksanaan kegiatan. Waktu pelaksanaan selama 3 tahun yang ditempuh dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Tahun ke-1; kegiatan yang dilaksanakan yaitu kabupaten/kota mengusulkan by name by address KPM PKH, yang telah graduasi selanjutnya dilakukan sosialisasi dan assessment bimbingan motivasi dan seterusnya.
- 2) Tahun ke-2; fokus kegiatan pada peningkatan kapasitas KPM yang masih bertahan sampai dengan akhir tahun pertama. KPM akan diberikan penguatan dengan kegiatan berupa family development session program kemampuan peningkatan keluarga (P2K2).
- 3) Tahun ke-3; penambahan modal usaha sebagai bentuk penghargaan bagi KPM PKH yang berhasil. Keberhasilan pemberdayaan KPM PKH graduasi dengan memperhatikan tiga aspek yaitu: aspek kelembagaan,

aspek ekonomi dan aspek sosial.

Dari pemerintah pusat penanganan kemiskinan melalui program PKH di tahun 2018 pemerintah DIY telah merealisasikan peyaluran PKH sampai dengan tahun IV sejumlah 213.557 KPM, dari KPM tersebut anaknya yang sekolah sampai jenjang perguruan tinggi ada 5.692 anak. Selain itu juga ada program bantuan pangan non tunai di DIY sebanyak 317.210 KPM.

Mencermati apa yang telah dilakukan oleh Pemerintah DIY bekerjasama dengan Pemerintah, maka perlu dilakukan evaluasi. Apakah dari sejumlah warga yang telah menerima KPM PKH tersebut yang telah melewati tahapan-tahapan tersebut sudah bisa mandiri, menjadi wirausaha mandiri dan berapa nilai omset atau jumlah tenaga kerja yang dapat diberdayakan program ini. LKPJ 2018 perlu memberikan laporan yang lebih rinci mengenai hal tersebut. Data jumlah penerima manfaat juga perlu disampaikan per Kabupaten/Kota untuk melihat sejauh mana distribusinya. Jangan sampai program ini tidak mencerminkan problem DIY yang sedang berusaha untuk menurunkan angka kemiskinan dan ketimpangan (pendapatan maupun wilayah).

b. Rekomendasi:

- 1) Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu. Hal ini untuk menjawab berbagai temuan dan keluhan tentang masih adanya data yang salah. Bahwa masih ada warga yang tidak masuk kategori miskin namun masih tercatat sebagai penerima manfaat.
- 2) Penanganan PMKS sebagaimana dicantumkan dalam Tabel 4.28 (halaman 4-53) LKPJ Gubernur DIY 2018, perlu dilaporkan kegiatan apa saja yang telah dilakukan dan bagaimana hasilnya? Dan jika program dan kegiatan itu berhasil berapa persen keberhasilannya.

4. Urusan Tenaga Kerja

a. Catatan:

Point penting lain, yang patut menjadi sorotan adalah masalah

pengangguran. Berdasarkan data yang dilansir dari hasil Survey Angkatan Kerja Nasional (sakernas), pada bulan Juli 2018, tercatat jumlah penganggur 73.350 orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 3,35%, angka tersebut naik sebesar 3,02% tapi secara nasional masih di bawah rata-rata sebesar 5,34%. Sedangkan data sakernas pada bulan Agustus 2018 sebanyak 2.191.742 orang, bertambah sebanyak 74.555 orang dibandingkan angkatan kerja pada Agustus 2017 sebanyak 2.117.187 orang, sedangkan penduduk yang bekerja sebanyak 2.118.392 orang, dalam hal ini ada kenaikan sebesar 65.224 orang, bila dibandingkan pada tahun 2017.

Problematika hari ini adalah adanya ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja. Akibat dari kesenjangan itu, maka jumlah pengangguran bertambah secara signifikan. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan bersifat lintas sektoral dan terintegrasi antara seluruh OPD yang ada di lingkungan Pemda DIY. Dalam RPJMD 2017-2022, dikatakan bahwa indikator kinerja urusan ketenagakerjaan adalah jumlah lulusan pelatihan yang ditempatkan. Sebagai contoh pada 2018 target penempatan sebesar 524 orang, realisasinya 539 orang atau capaian sebesar 102,86%. Hal ini sudah memberikan harapan positif dan gambaran riil dalam target penurunan angka pengangguran, sekaligus memberikan informasi tentang IPK DIY 2018, sudah mendekati kinerja ideal.

Pada aspek lain muncul kerisauan dan pertanyaan, khususnya terkait dengan masalah ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi. Terkesan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak selalu paralel dengan serapan tenaga kerja. Oleh karena itu dalam hal ini ada kesalahan konsep dan keterputusan antara pertumbuhan dengan serapan tenaga kerja itu sendiri. Pertanyaannya adalah dimana letak kesalahan itu atau tidak sambungnya antara pertumbuhan ekonomi dengan serapan tenaga kerja? Seharusnya dengan pertumbuhan ekonomi DIY Tahun 2018 sebesar 6,20% itu Pemerintah DIY sudah dapat menekan pertumbuhan pengangguran terbuka di DIY.

b. Rekomendasi

- 1) Penanganan dan penanggulangan issue-issue pengangguran, Pemerintah Daerah DIY harus terus-menerus mengupayakan penciptaan lapangan kerja baru yang produktif padat karya dan banyak menyerap para pencari kerja baru. Oleh karena itu, keterkaitan dengan sektor-sektor lain perlu dibangun sinergisitas yang terintegrasi, agar issue ini kedepan tidak lagi menjadi hal yang menakutkan tapi justru sudah terbangun solusi tepat bagi SDM yang ada di wilayah DIY.
- 2) Seyogyanya prestasi yang telah dicapai, harus terus ditingkatkan sesuai tuntutan era, yang butuh SDM handal dan terampil. SDM DIY, punya peluang untuk merebut pangsa kerja yang lebih baik dan lebih luas, khususnya momentum Masyarakat Ekonomi Asean.

5. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Catatan:

Sesuai amanat Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana, serta pembangunan nasional Indonesia harus dilaksanakan dengan prinsip "Kependudukan sebagai Titik Sentral Kegiatan Pembangunan". Dalam konteks pengendalian penduduk dan penyelenggaraan Keluarga Berencana di DIY, dapat dilihat dari relatif rendah angka kelahiran bayi bila dibanding dengan Provinsi lain.

Total Fertility Rate (TFR) Daerah Istimewa Yogyakarta secara perlahan tapi pasti, mengalami kenaikan sejak 2012 sampai dengan 2017, hingga mencapai angka 2,2 Juta, peningkatan ini pula yang disinyalir menjadi penyebab utama peningkatan jumlah penduduk di DIY. Namun pertumbuhannya masih dalam trend positif. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Adalah meningkatnya rata-rata usia perkawinan pertama perempuan dan keberdayaan keluarga dari usia balita sampai lansia. Indikator kinerja antara lain: 1) Rata-rata usia kawin pertama perempuan pada tahun 2018 adalah 24,40 dengan capaian 25,32, maka pencapaiannya 103,77%; 2) Legalitas keluarga, target pencapaian pada tahun 2018 sebesar 98,00% dengan capaian 98,15% sehingga capaian sebesar 100,15%.

b. Rekomendasi

- 1) Pencapaian kinerja 2018, sudah cukup memuaskan. Namun Upaya peningkatan kinerja dan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, harus lebih ditingkatkan, dilakukan secara berkesinambungan, sesuai tahapan yang berlaku serta melakukan upaya baru sebagai solusi tambahan untuk menekan pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- 2) Terus melakukan upaya koordinasi, lintas sektoral menjadi keniscayaan, agar harmonisasi antar perangkat OPD untuk pencapaian program Kependudukan dan KB di DIY dapat terkondisi dengan baik.

6. Urusan Kebudayaan

a. Catatan:

Dalam RPJPD DIY 2005-2025, Visi yang dibangun adalah "DIY pada tahun 2025 sebagai pusat Pendidikan, Pusat Budaya, dan Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera". Visi tersebut menjadi lebih kukuh setelah adanya Penetapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY dan diperkuat lagi dengan lahirnya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 3 tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pengembangan Kebudayaan. Visi tersebut menjadi lebih operatif dan nyata, adanya dukungan dan alokasi dana keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah pusat.

Pemda DIY dalam menelisik kinerja urusan kebudayaan, menggunakan 4 indikator capaian, antara lain:

- 1) Jumlah budaya benda yang dikelola dan dilestarikan;
- 2) Meningkatnya kinerja pengembangan nilai sejarah, warisan budaya dan museum;
- 3) Peningkatan penyelenggaraan even budaya tingkat provinsi, nasional, internasional di Taman Budaya;
- 4) Peningkatan kinerja pengembangan seni budaya DIY.

Dari keempat indikator kinerja urusan kebudayaan tahun 2017-2018 serta capaiannya pada 2018 dengan rincian sebagai berikut: (1) Jumlah benda budaya yang dikelola dan dilestarikan, target sebanyak 568, realisasi sebanyak 578 atau capaian target sebesar 102%, (2) Pengembangan nilai

sejarah, warisan budaya, dan museum target sebanyak 5,12 realisasi sebanyak 5,67 atau capaian target sebesar 111%, (3) Penyelenggaraan even propinsi, nasional dan internasional, target 5,29 realisasi sebesar 5,58 atau capaian target sebesar 105%, (4) Peningkatan kinerja seni budaya DIY target sebesar 4,13 realisasi 4,14 atau capaian target sebesar 100,24%.

Secara umum capaian di bidang urusan kebudayaan sudah memberikan trend positif bagi tumbuh kembangnya aspek-aspek kebudayaan yang ada di DIY. Sekalipun demikian masih perlu perbaikan dalam pencapaiannya.

b. Rekomendasi

- 1) Kedudukan kebudayaan dalam ranah Pemerintahan DIY merupakan inti dan ruh Keistimewaan, maka keberadaan aspek kebudayaan haruslah menjadi fokus utama sebagai bahan pengembangan, penggalian dan pelestarian seluruh komponen yang terkait dengan aspek kebudayaan;
- 2) Aspek perlindungan hukum terhadap aset-aset budaya fisik dan non fisik harus menjadi perhatian utama Pemda DIY, agar hal keberadaannya sebagai khasanah dan kekayaan intelektual bangsa dapat terjaga dan tumbuh secara berkesinambungan.
- 3) OPD yang terkait, dengan aspek kebudayaan dan pariwisata harus bersinergi untuk mengawal dan mengembangkan keberadaan benda-benda budaya dan seni budaya yang ada di DIY. Karena hal-hal tersebut, merupakan nilai dukung utama bagi pengembangan dunia pariwisata dan nilai-nilai Keistimewaan DIY

IV. PENUTUP

Terhadap sektor sektor yang telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagaimana yang telah dilaporkan dalam LKPJ Gubernur Tahun 2018, DPRD DIY memberikan apresiasi atas keberhasilan kinerja Pemerintah Daerah DIY. Namun demikian DPRD DIY juga berharap agar catatan dan rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur Tahun 2018 terutama terhadap 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) yg belum mencapai target, agar dapat ditindaklanjuti dengan segera oleh eksekutif pada proses perencanaan berikutnya, dimulai pada saat pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 dan pengawasannya melalui Alat Kelengkapan DPRD DIY yang ada.

Demikian yang dapat kami laporkan, semoga hasil Pansus berupa Catatan dan Rekomendasi DPRD DIY terhadap LKPJ Gubernur DIY Akhir Tahun 2018 dapat bermanfaat bagi evaluasi dan perbaikan kinerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta pada masa mendatang.

Sebelum kami akhiri laporan ini, apabila ada kata yang kurang berkenan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Billahittaufiq Walhidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 April 2019

Pimpinan Pansus BA No 9 Tahun 2019

Ketua

Wakil Ketua

Hj. TUTIEK MASRI WIDYO, SE.

Drs. EDY SUSILA